



**RANCANGAN
RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN JUMANTONO
TAHUN 2024 – 2026**

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Jumantono Tahun 2024-2026.

Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Jumantono Tahun 2024-2026 ini dimaksudkan sebagai bahan masukan untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026.

Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Jumantono ini merupakan himpunan rencana strategis yang disusun oleh Kecamatan Jumantono, yang mempunyai fungsi strategis untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama tiga tahun kedepan.

Kecamatan Jumantono sebagai organisasi perangkat daerah Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas menyusun Rencana Strategis sebagai acuan kerja dan usaha perbaikan aparatur perangkat daerah dalam rangka menghadapi tuntutan masyarakat akan transparansi dan stabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu menyusun sampai dengan selesainya Rancangan Rencana Strategis ini. Kami menyadari dalam menyusun Rancangan Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan penyusunan selanjutnya.

Jumantono, Februari 2023

CAMAT JUMANTONO

BAMBANG SRIYANTO. S.Sos.,MM
Pembina
NIP. 19681020 199603 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii	
DAFTAR ISI	iii	
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1.Latar Belakang	4
	1.2.Dasar Hukum Penyusunan	7
	1.3.Maksud dan Tujuan	10
	1.1.Sistematika Penulisan	11
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN	
	2.1.Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Jumantono	13
	2.2.Sumber Daya Kecamatan Jumantono	13
	2.3.Kinerja Pelayanan Kecamatan Jumantono	20
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN JUMANTONO	
	3.1.Permasalahan Pelayanan Kecamatan Jumantono	37
	3.2.Isu Strategis	40
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
	4.1.Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Jumantono Tahun 2024-2026	42
	4.2.Cascading Kinerja Kecamatan Jumantono	43
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
	5.1.Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Jumantono	49
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
	6.1.Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Jumantono	51
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
	7.1. Indikator Kinerja Kecamatan Jumantono	81
BAB VIII	PENUTUP	82
	8.1. Kaidah Pelaksanaan	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Jumantono Tahun 2024-2026 merupakan amanat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, dimana Pemerintah Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakhir pada tahun 2023 untuk menyusun dokumen Rencana Strategis (RENSTRA). Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Jumantono, maka disusunlah Rencana Strategis Kecamatan Jumantono sebagai satu kesatuan unit yang utuh dari manajemen kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

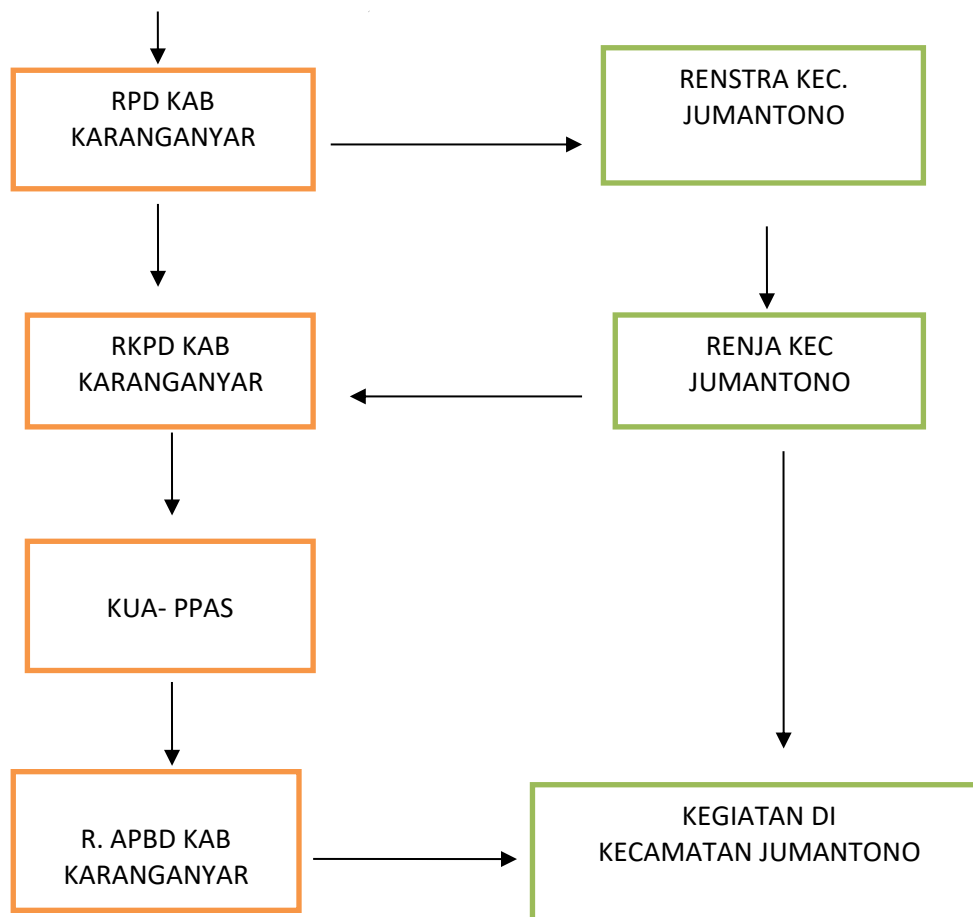
Renstra Kecamatan Jumantono Tahun 2024-2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026. Oleh karena itu, penyusunan Renstra Kecamatan Jumantono Tahun 2024-2026 mengacu pada RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026, dan memperhatikan capaian-capaian yang telah diwujudkan yakni capaian kinerja sampai dengan tahun 2022. Sebagian besar indikator kinerja dapat mencapai target yang telah ditetapkan, sementara itu beberapa indikator belum dapat mencapai target meski mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Data-data hasil kinerja tersebut meskipun beberapa masih bersifat sementara menunjukkan bahwa Kecamatan Jumantono cukup terdampak Pandemi Covid-19 yang secara signifikan mempengaruhi kinerja pembangunan.

Renstra Kecamatan Jumantono Tahun 2024-2026 akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Jumantono untuk menjalankan program dan kegiatan juga akan menjadi dasar dalam evaluasi kinerja selama tiga tahun kedepan.

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jumantono Tahun 2024-2026 ini merupakan penjabaran dari Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Dengan demikian, maka antara dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jumantono Tahun 2024-2026 dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 merupakan satu kesatuan dokumen Rencana Pembangunan yang saling berkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program

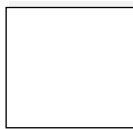
dan capaian yang dicapai dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jumantono Tahun 2024-2026 harus selaras dan konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPD.



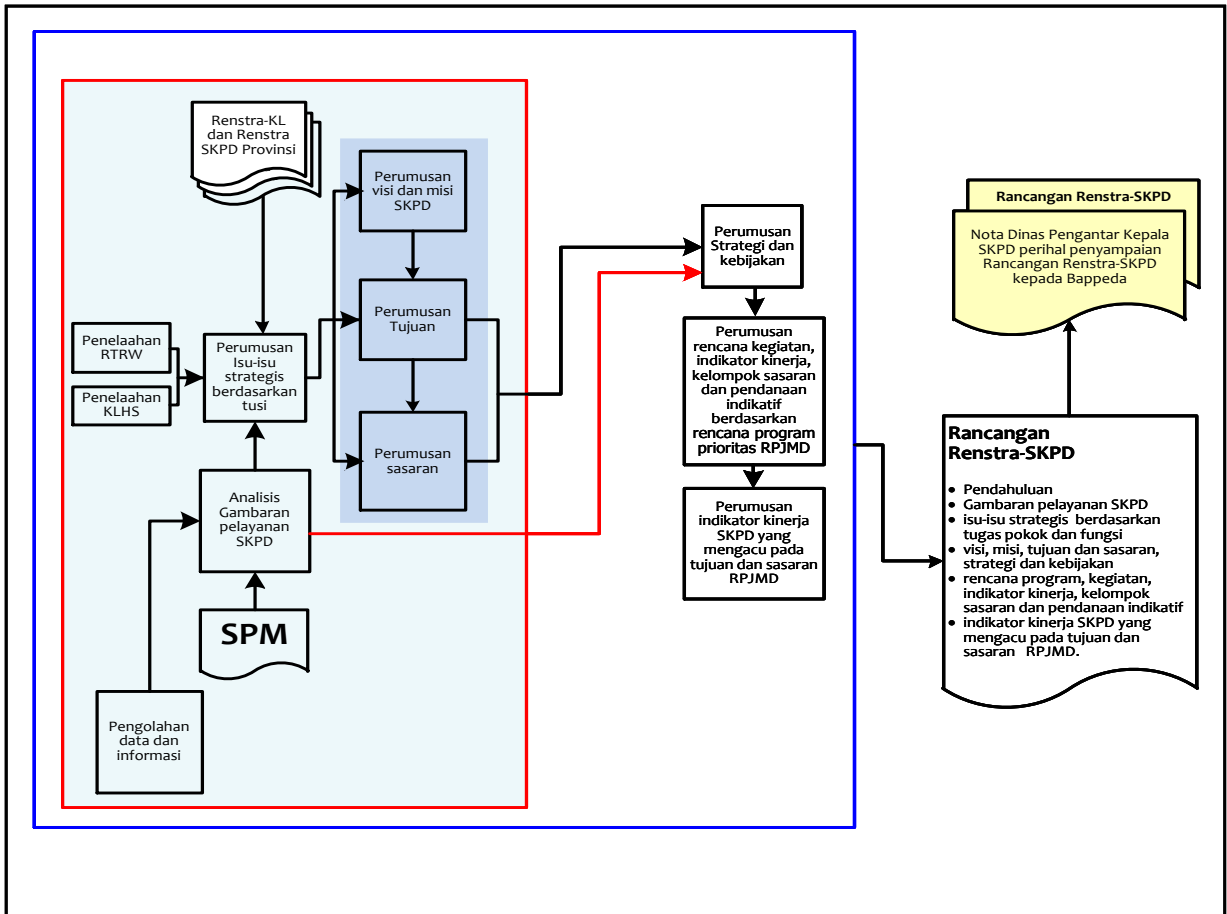
Gambar 1.1 Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Jumantono Dengan Dokumen Perencanaan Daerah

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jumantono Tahun 2024-2026, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, mudah, transparan serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk 3 (tiga) tahun kedepan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Jumantono dalam kurun waktu Tahun 2024-2026, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Jumantono untuk 3 (tiga) tahun kedepan.



Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah:



Secara operasional Rencana Strategis Kecamatan Jumantono Tahun 2024-2026 harus mengacu kepada dokumen RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026. Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jumantono Tahun 2024-2026 ini disusun secara simultan (bersamaan) dengan penyusunan RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026. Oleh karena itu, proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jumantono Tahun 2024-2026 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Kecamatan Jumantono Tahun 2024-2026 merupakan bagian integral dari RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 yang pelaksanaan tahunannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Kecamatan Jumantono. Tahapan perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumber daya dan arah pembangunan daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Jumantono Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 13);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa - Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penanganan Stunting;
19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15

Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 71);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 5);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 139);
36. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Kecamatan Jumantono Tahun 2024-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Jumantono untuk kurun waktu Tahun 2024-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Jumantono sebagai penjabaran dari RPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jumantono.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jumantono Tahun 2024-2026 yaitu :

- 1) Merumuskan gambaran umum kondisi wilayah Kecamatan Jumantono sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan.
- 2) Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 3 (tiga) tahun ke depan.
- 3) Memberikan arah dan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jumantono.
- 4) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jumantono untuk kurun waktu Tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Jumantono.
- 5) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Jumantono dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jumantono yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu Tahun 2024-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jumantono Tahun 2024 - 2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jumantono Tahun 2024 - 2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kecamatan Jumantono, sumber daya yang dimiliki Kecamatan Jumantono, kinerja pelayanan Kecamatan Jumantono, serta kelompok sasaran layanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Jumantono.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas

dan fungsi pelayanan Kecamatan Jumantono, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Jumantono, serta cascading kinerja Kecamatan Jumantono mulai dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta indikatornya.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kecamatan Jumantono dalam mencapai tujuan dan sasaran tahun 2024-2026.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini memuat uraian rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator kinerja, target, dan pagu indikatifnya.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat tentang penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Jumantono tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Jumantono pada tahun 2024-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN JUMANTONO

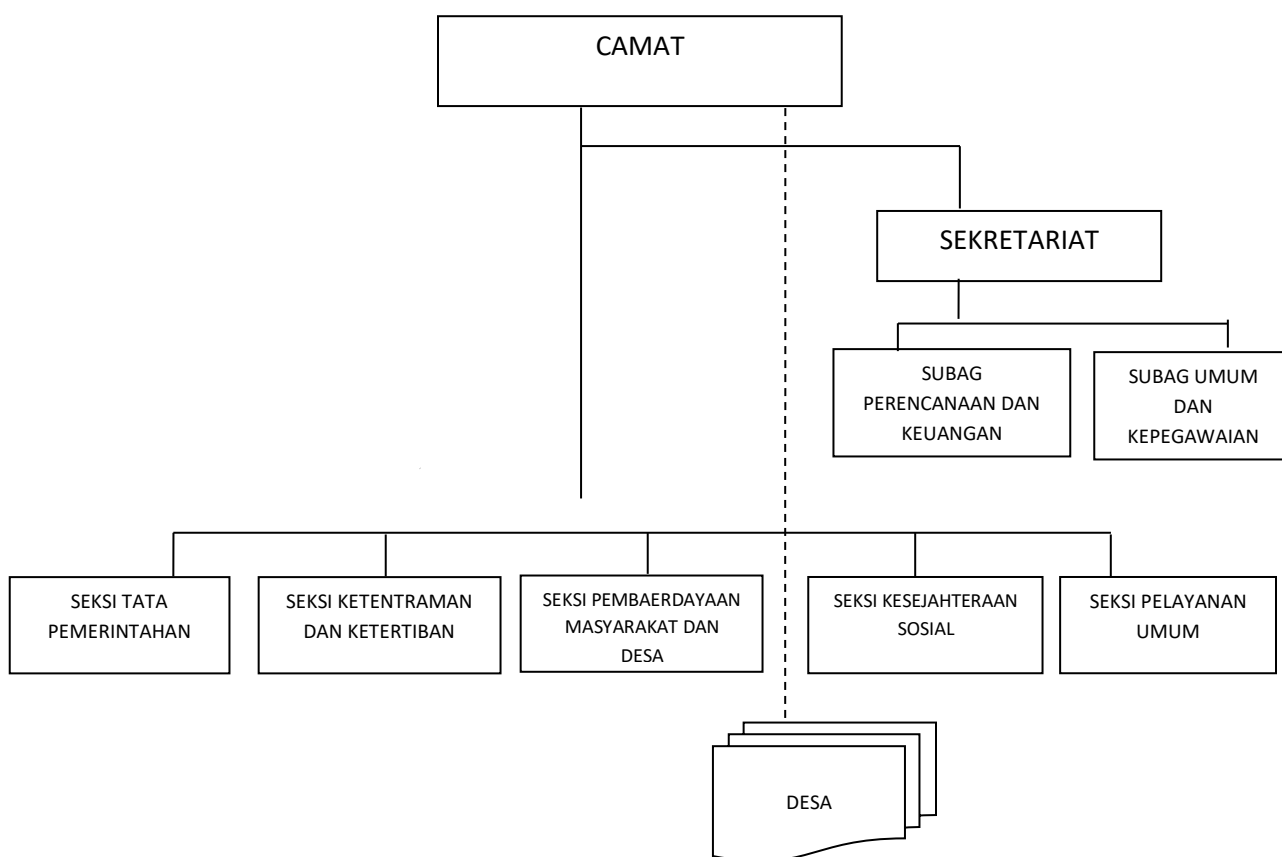
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Jumantono

Kecamatan Jumantono merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karanganyar yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Jumantono dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Jumantono mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

2.1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Jumantono

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, maka kedudukan Pemerintah Kecamatan berubah menjadi Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam usaha meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka telah diatur dan ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Jumantono yang sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Struktur organisasi dan tata kerja tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat.

Adapun bagan organisasi perangkat daerah sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan

2.1.2 Uraian Tugas

Struktur organisasi Kecamatan Jumantono berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari :

1. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Untuk menyelenggarakan tugas, Camat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;

- c. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di kecamatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat merupakan unsur pembantu Camat. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaporan, pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja;
- b. pengkoordinasian kegiatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, valuasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban.

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan peningkatan kesejahteraan rakyat dan kegiatan lingkup internal kecamatan maupun dengan pihak terkait di bidang kesejahteraan rakyat dan pelayanan sosial masyarakat.

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat.

7. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan urusan pelayanan umum.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Salah satu sumberdaya organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan sumber daya manusia (pegawai) baik secara kuantitas maupun kualitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas.

Pegawai Kecamatan Jumantono berjumlah 30 orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) 12 orang dan Tenaga Harian Lepas (THL) 18 orang. Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kecamatan Jumantono Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Kategori				Jumlah	
		ASN		Non ASN		L	P
		L	P	L	P		
1	SMP Sederajat	0	0	0	0	0	0
2	SMA Sederajat	2	2	6	2	8	4
3	D3	0	0	1	2	1	2
4	S1	4	1	3	4	7	5
5	S2	2	1	0	0	2	1
Jumlah		8	4	10	8	18	12

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jumantono (2023)

Sumber daya manusia (Pegawai) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Kecamatan Jumantono Tahun 2023

No	Golongan	Jumlah	
		L	P
1	Golongan I	0	0
2	Golongan II	2	0
3	Golongan III	3	3
4	Golongan IV	3	1
Jumlah		8	4

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jumantono (2023)

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan daya dukung pegawai, maka dilakukan pembinaan pegawai yang diarahkan pada peningkatan kinerja masing-masing individu dalam mengemban tugas dan kewajiban yang dibebankan sesuai dengan posisi masing-masing baik sebagai pejabat struktural maupun fungsional umum. Sebagai kebijakan, Kecamatan mengadakan pembinaan rutin terhadap pegawai Kecamatan dan menerapkan sistem pengawasan melekat oleh masing-masing atasannya yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk Penilaian Prestasi Kerja ASN setiap akhir tahun (bulan Desember). Dengan dasar Penilaian Prestasi Kerja ASN tersebut seorang perangkat kecamatan akan dinilai kinerjanya sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kerjanya serta dapat dipromosikan untuk memperoleh kenaikan pangkat reguler ataupun pilihan, dan menduduki jabatan tertentu pada tingkat Kecamatan.

Dalam pembinaannya masing-masing jabatan diarahkan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan beban tugas yang telah diatur dalam peraturan perundang-perundangan yang berlaku, disamping melaksanakan tugas-tugas lainnya, seperti pelaksanaan tugas yang termasuk dalam lingkup tugas pembantuan dan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Kecamatan Jumantono Tahun 2023

No	Nama Barang	Jumlah	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	1		
2	Station Wagon	1	1		
3	Sepeda Motor	1	1		
4	Penyemprot Otomatis	1	1		
5	Lemari Besi/Metal	9	6	3	
6	Filing Cabinet Besi	9	6	3	

7	Kursi Besi/Metal	45	40	5	
8	Meja Rapat	8	8		
9	Tempat Tidur Kayu	1	1		
10	Kasur/Spring Bed	1	1		
11	Kursi Rapat	82	75	7	
12	Kursi Tamu	3	3		
13	Kursi Biasa	7	7		
14	Bangku Tunggu	3	3		
15	Kursi Lipat	7	7		
16	A.C Window	5	5		
17	Kipas Angin	8	8		
18	Kompas Gas	1	1		
19	Rice Cooker	1	1		
20	Tabung Gas	2	2		
21	Sound System	1	1		
22	Microphone	1	1		
23	Microphone Floor Stand	3	3		
24	Mimbar/Podium	1	1		
25	Alat Rumah Tangga lain-lain	3	3		
26	Meja Kerja Eselon IV	4	4		
27	Meja Kerja Pejabat lain-lain	9	9		
28	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	9	9		
29	Layar Film/Projector	2	2		
30	Telephone (PABX)	1	1		
31	P.C Unit	5	5		
32	Laptop	9	7	2	
33	Monitor	4	4		
34	Printer	5	5		
35	Modem	1	1		
36	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1		
37	Bangunan Gedung Kantor lain- lain	1	1		
38	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	1		
39	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1	1		

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Jumantono. Kinerja Pelayanan di Kecamatan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu :

- 1) Meningkatnya pelayanan administrasi umum;
- 2) Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur; dan
- 3) Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan dapat dijelaskan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- 1) Pelayanan Administrasi Umum
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor di Kecamatan Jumantono setiap tahun mengalami peningkatan seiring dengan pesatnya informasi dan teknologi guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur.
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik di Kecamatan Jumantono dari tahun ke tahun mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya kenaikan tarif dasar listrik (TDL), namun anggaran dana yang tersedia masih mencukupi.
 - c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Jumantono setiap tahun dalam menunjang pelayanan ke Masyarakat terus meningkat, disebabkan pelayanan kepada Publik bertambah. Namun, Penyediaan Alat Tulis Kantor setiap tahun mampu terpenuhi.
 - d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di Kecamatan Jumantono setiap tahun dalam menunjang kegiatan dapat mencukupi, walaupun semakin banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetakan dan penggandaan meningkat.
 - e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan Jumantono setiap tahunnya mengalami pembaharuan,

disebabkan Peralatan dan Perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambat Pelayanan kepada masyarakat.

f. Penyediaan Makanan dan Minuman.

Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Jumantono setiap tahunnya mengalami kenaikan, dikarenakan padatnya kegiatan dan semakin meningkat harga barang di Kecamatan sehingga penjamuan pada setiap kegiatan tidak maksimal.

g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah.

Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun ke luar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi meningkat.

2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Jumantono dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Kecamatan Jumantono terdiri dari 11 desa, 57 dusun, 293 dukuh, 114 RW dan 304 RT. Seluruh desa sudah berklasifikasi desa swa sembada.

Tabel 2.4
Jumlah Dusun, Dukuh, RW dan RT
Kecamatan Jumantono Tahun 2023

DESA	DUSUN	DUKUH	RW	RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sedayu	5	28	12	26
Kebak	5	22	9	22
Gemantar	7	8	7	20
Tunggulrejo	9	46	18	46
Genengan	6	31	12	32
Ngunut	4	25	8	20
Tugu	4	28	10	27
Sukosari	3	17	7	17
Sambirejo	4	28	6	28
Blorong	4	30	8	30
Sringin	6	30	14	36
JUMLAH	57	293	111	304

Berdasarkan data monografi desa, jumlah desa yang memiliki staff hanya 2 desa yaitu Desa Gemantar dan Desa Ngunut.

Tabel 2.5
Jumlah Lurah/Sekdes, Kadus, kaur dan Staf di desa
Kecamatan Jumantono Tahun 2023

DESA	KADES	SEKDES	KADUS	KASI/KAUR	STAF
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(6)
Sedayu	1	1	5	3/3	0
Kebak	1	1	5	3/3	0
Gemantar	1	1	7	3/3	1
Tunggulrejo	1	1	9	3/3	0
Genengan	1	1	6	3/3	0
Ngunut	1	1	4	3/3	2
Tugu	1	1	4	3/3	0
Sukosari	1	1	3	3/3	0
Sambirejo	1	1	4	3/3	0
Blorong	1	1	4	3/3	0
Sringin	1	1	6	3/3	0
JUMLAH	10	10	61	30/30	0

Peningkatan kesejahteraan penduduk menjadi tugas pelayanan dari Kecamatan. Berdasarkan data profil kecamatan dalam buku Kecamatan Dalam Angka, terdapat data penduduk pra sejahtera pada tahun 2017 sebanyak 1.479 KK dan KS I sebanyak 1.381 KK.

Tabel 2.6
Jumlah Pra KS, KS I di desa Kecamatan Jumantono

DESA	Pra KS	KS I	KS II	KS III	KS III+	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sedayu	303	30	124	1.258	10	1.725
Kebak	155	21	84	955	6	1.221
Gemantar	41	20	365	756	11	1.193
Tunggulrejo	86	15	224	1.281	8	1.614
Genengan	117	23	40	1130	38	1.348
Ngunut	162	20	34	932	12	1.160
Tugu	146	14	356	925	15	1.456
Sukosari	186	6	36	828	6	1.062
Sambirejo	216	14	84	635	5	954
Blorong	76	24	239	860	9	1.208
Sringin	313	22	59	1.260	12	1.666
JUMLAH	1.801	209	1.645	10.820	132	14.607

Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan pada lembaga yang ada di Desa yaitu Posyandu, PKK, BPD Karangtaruna, RT dan RW.

Tabel 2.7
Jumlah Posyandu, PKK, BPD, dan Karang Taruna Desa
Kecamatan Jumantono

NO	DESA	POSYANDU	PKK	BPD	KARANGTARUNA	RT	RW
1	Sedayu	12	1	1	1	26	12
2	Kebak	9	1	1	1	22	9
3	Gemantar	7	1	1	1	20	7
4	Tunggulrejo	18	1	1	1	46	18
5	Genengan	12	1	1	1	32	12
6	Ngunut	8	1	1	1	20	8
7	Tugu	10	1	1	1	27	10
8	Sukosari	7	1	1	1	17	7
9	Sambirejo	6	1	1	1	28	6
10	Blorong	8	1	1	1	30	8
11	Sringin	14	1	1	1	36	14
	JUMLAH	111	11	11	11	304	111

Sesuai dengan kondisi alam Kecamatan Jumantono yang pegunungan, maka sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian di sektor pertanian (petani sendiri dan buruh tani). Kemudian sebagai buruh industri/karyawan swasta, buruh bangunan dan pedagang. Selebihnya adalah sebagai pengusaha, di sektor pengangkutan, PNS/TNI/Polri, pensiunan, jasa-jasa dan lain-lain.

Guna menunjang laju perekonomian di Desa Jumantono pada tahun 2023 terdapat pasar desa 3 buah, toko/warung kelontong 302 buah, kedai/Warung makan 165 buah, KUD 1 buah, bank umum 2 unit, dan BPR 2 unit, Koperasi (KSP) sebanyak 8, Bank Muamalat/Syariah ada 2.

Tabel T-C. 23
Pencapaian Kinerja Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Pada Tahun			Realisasi Capaian Pada Tahun			Rasio Capaian Pada Tahun		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1.	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%									
2.	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%									
3.	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%									
4.	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%									
5.	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%									
6.	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%									

7.	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%									
8.	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%									
9.	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	%									
10.	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%									
11.	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	%									
12.	Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%									

13.	Cakupan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%									
14.	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%									

Tabel T-C.24
Realisasi Anggaran Program Kecamatan Jumantono

NO	PROGRAM	2021			2022			2023		
		T	Realisasi	%	T	Realisasi	%	T	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.363.274.000	2.294.355.928	99	2.272.367.000	1.974.551.839	86.89	2.381.172.258		
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.000.000	2.000.000	100	2.867.400	2.867.400	100	5.499.000		
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	18.500.000	18.500.000	100	16.008.000	16.008.000	100	17.950.400		
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	70.320.000	69.634.600	99	275.576.100	275.376.100	99,93	139.616.000		
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	17.525.000	17.525.000	100	86.713.100	86.670.600	99,95	66.994.300		
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Desa	20.000.000	20.000.000	100	17.462.400	17.462.400	100	36.935.400		

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Jumantono

Uraian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	2.363.274.000	2.272.367.000	2.381.172.258	2.294.355.928	1.974.551.839		99	86.89			99
<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	8.000.000	3.891.100	8.481.600	8.000.000	3.891.100		100	100			100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.000.000	1.834.100	1.834.100	4.000.000	1.834.100		100	100			100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	2.057.000	6.647.500	-	2.057.000		-	100			100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000	-	-	4.000.000	-		100	-			100
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	1.882.019.000	1.909.904.324	1.633.675.358		1.618.772.280		97	99			98
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.882.019.000	1.867.054.324	1.633.675.358	1.820.067.710	1.575.922.280		97	84.41			97
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	7.750.000	-	-	7.750.000		-	100			100
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	35.100.000	-	-	35.100.000		-	100			100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-		-	-						

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	-	-						
Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.843.700	67.209.628	167.656.275	67.843.700	67.209.628		100	100			100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	8.262.500	6.817.128	8.000.000	8.262.500	6.817.128		100	100			100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.500.000	-	-	16.500.000			100	-			100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.620.000	6.911.700	6.000.000	10.620.000	6.911.700		100	100			100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.481.200	6.480.000	8.340.000	5.481.200	6.480.000		100	100			100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.980.000	3.840.000	2.760.000	1.980.000	3.840.000		100	100			100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000	43.160.800	142.556.275	25.000.000	42.157.660		100	97.68			100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	253.175.000	121.115.000	252.662.500	250.175.000	120.715.000						
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	-						
Pengadaan Mebeleur	19.800.000	6.600.000	-	19.800.000	6.600.000		100	100			100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.375.000	14.515.000	52.662.500	33.375.000	14.515.000		100	100			100
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	100.000.000	-	-	99.600.000		-	99.60			99.60

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	200.000.000	-	-						
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	-	-	197.000.000	-		99	-			99
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>106.150.000</i>	<i>120.345.948</i>	<i>270.579.000</i>	<i>102.427.668</i>	<i>116.002.347</i>						
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.350.000	500.000	960.000	1.350.000	500.000		100	100			100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	26.800.000	31.200.000	31.200.000	23.077.668	26.856.399		86	86.08			86
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78.000.000	88.645.948	238.419.000	78.000.000	88.645.948		100	100			100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>46.086.300</i>	<i>49.901.000</i>	<i>48.117.525</i>	<i>46.086.300</i>	<i>48.964.624</i>						
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	21.608.300	23.408.000	24.985.000	21.363.850	22.479.500		99	96.03			99
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.600.000	12.560.000	18.140.000	12.600.000	12.560.000		100	100			100
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	11.878.000	13.933.000	4.992.525	11.878.000	13.925.124		100	99.94			100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-						

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.000.000	2.867.400	5.499.000	2.000.000	2.867.400		100	100			100
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	2.867.400	5.499.000	-	2.867.400		100	100			100
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	70.320.000	275.376.100	139.616.000	69.634.600	275.376.100		99	99.93			99
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum											
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	275.376.100	139.616.000	-	275.376.100		99	99.93			99
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	17.525.000	86.670.600	66.994.300	17.525.000	86.670.600		100	99.95			100
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah											
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-	18.975.000	48.000.000	-	18.975.000		-	100			100
Pembinaan Kerukunan Antar suku & intra suku,	-	67.738.100	18.994.300	-	67.695.600		-	99.94			99.94

Umat beragama, Ras & Gol. Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional & Nasional												
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	18.500.000	16.008.000	17.950.400	18.500.000	16.008.000		100	100				100
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa												
Fasilitasi Sinkronasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8.500.000	6.031.300	5.950.400	8.500.000	6.031.300		100	100				100
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000	9.976.700	12.000.000	10.000.000	9.976.700		100	100				100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	20.000.000	17.462.400	36.935.400	20.000.000	17.462.400		100	100				100
Fasilitasi, Rekomendasi & Koordinasi Pembinaan & Pengawasan Pemerintahan Desa												
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.000.000	9.127.000	17.495.000	10.000.000	9.127.000		100	100				100
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.000.000	8.335.400	19.440.400	10.000.000	8.335.400		100	100				100

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Jumantono

2.3.1 Tantangan

- 1) Adanya tuntutan pengembangan teknologi.
- 2) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 3) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja yang dihasilkan.
- 4) Cepatnya arus informasi masyarakat dalam menyampaikan, saran keluhan dan masukan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2.3.2 Peluang

- 1) Adanya tuntutan implementasi *Good Governance* dan *Clean Government* merupakan peluang pada Kantor Kecamatan Jumantono untuk meningkatkan kinerja.
- 2) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN JUMANTONO

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Jumantono

Bertitik tolak dari pengertian isu strategis diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jumantono, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Jumantono yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pelimpahan kewenangan Bupati ke Kecamatan.	Belum optimalnya pelimpahan kewenangan Bupati ke Kecamatan.	
		Belum optimalnya kinerja kecamatan sebagaimana PP Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan	
1	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik masih perlu ditingkatkan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbatasnya jumlah aparat/pegawai di kecamatan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal; b. Belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing; c. Belum meratanya kompetensi dan pendidikan sumber daya aparatur; d. Belum optimalnya penerapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sehingga penilaian kerja aparatur pemerintahan kurang; e. Masih lemahnya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran; f. Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan sehingga pelayanan terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Seksi Tata Pemerintahan <ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat; b. Masih rendahnya disiplin aparatur desa; c. Kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa; d. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa; e. belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. 2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban <ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya sosialisasi Perda; b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum; c. Belum optimalnya pembinaan Linmas desa; d. Belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI); e. menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat. 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa <ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa; b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pelimpahan kewenangan Bupati ke Kecamatan.	Belum optimalnya pelimpahan kewenangan Bupati ke Kecamatan.	
		Belum optimalnya kinerja kecamatan sebagaimana PP Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan	
		<p>masyarakat terhambat;</p> <p>g. Belum optimalnya pengelolaan aset di kecamatan;.</p> <p>h. Belum optimalnya sistem kearsipan di kecamatan.</p>	<p>pembangunan wilayah;</p> <p>c. Masih kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan;</p> <p>d. Masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan.</p> <p>4. Seksi Kesejahteraan Sosial</p> <p>a. Belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial;</p> <p>b. Kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan perempuan;</p> <p>c. Masih tingginya tingkat pengangguran;</p> <p>d. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa.</p> <p>5. Seksi Pelayanan Umum</p> <p>a. Belum optimalnya pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat</p> <p>b. Terbatasnya sarana dan prasarana.</p> <p>c. Belum optimalnya pengelolaan aset di kecamatan;.</p> <p>d. Belum optimalnya sistem</p> <p>e. kearsipan di kecamatan.</p>

3.2. Penentuan Isu Strategis

Isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Kemiskinan;

Sasaran pembangunan salah satunya adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang. Sementara pembangunan diharapkan dapat merata, dan tujuan pemerataan pembangunan dapat tercapai dengan memanfaatkan kearifan lokal untuk percepatan penurunan kemiskinan dan pemulihan ekonomi nasional.

Salah satu strategi penurunan kemiskinan yang penting selain mengurangi beban pengeluaran adalah dengan meningkatkan pendapatan seperti peningkatan akses permodalan, peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran, pengembangan keterampilan dan layanan usaha, serta pengembangan kewirausahaan dan kemitraan.

Sosialisasi tentang kemiskinan penting dilakukan karena isu kemiskinan telah menjadi realitas media dan menjadi perdebatan hangat di ruang publik. Program penanggulangan kemiskinan merupakan upaya nyata pemerintah yang bekerja keras untuk menurunkan jumlah warga miskin. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warga negara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat, oleh karena itu sinergi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan.

Program-program penanggulangan kemiskinan yang telah digulirkan pemerintah antara lain Programm Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasioan Sekolah (BOS), Program Banyuan Siswa Miskin (BSM), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), dan lain-lain.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Isu strategis berikutnya adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga masih harus ditingkatnya kualitas yang belum memadai tersebut agar dapat menunjang kinerja pelayanan maupun operasional di kecamatan sehingga menjadi lebih baik;

3. Daya Saing Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi daerah menjadi salah satu perhatian utama lainnya setelah kemiskinan dikarenakan perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah akan berpengaruh luas ke banyak sektor. Sebagaimana

terjadi di tahun 2020, dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi akibat Covid-19 telah menjadikan pendapatan per kapita ikut menurun, meningkatkan pengangguran terbuka, meningkatkan jumlah penduduk miskin, dan lainnya.;

4. Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi / Integritas dan akuntabilitas Aparatur Sipil Negara dan Birokrasi yang profesional, inovatif, akuntabel yang mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal, hubungan yang harmonis dan sinergis pemerintah daerah (birokrasi) dengan dunia usaha (masyarakat ekonomi), kader-kader politik (masyarakat politik), akademisi dan media diperlukan dalam reformasi birokrasi.

5. Daerah Rawan Bencana

Isu dalam area ketahanan bencana adalah pengembangan sistem mitigasi bencana yang responsif, cepat, tepat dan berkelanjutan. Mitigasi adalah keadaan kemampuan masyarakat paham atas apa yang harus dilakukan untuk mengurangi resiko bencana dan apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana. Isu teknisnya adalah bagaimana pemerintah dan masyarakat secara pro aktif mampu melakukan premapping (pemetaan ulang) dan revisitator ruang.

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Jumantono

4.1.1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program, dan sub kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan jangka menengah Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi.
2. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial.

4.1.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Jumantono.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Jumantono beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C. 25 sebagaimana berikut ini.

Tabel T-C. 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Jumantono
Tahun 2024-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun			Target Akhir Renstra
					2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	skor	Na				
		Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	Na	75.3	75.6	75.8	76
		Meningkatkan kondusifitas wilayah	Jumlah Kasus gangguan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan		Na	0	0	0	0
	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial		Angka Kemiskinan		Na				

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun			Target Akhir Renstra
					2023	2024	2025	2026	
		Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun		Na	0,8	0,9	0,9	0,9

CASCADING

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Tahun N-1	Target			Program	Indikator Program	Kondisi Tahun N-1	Target			Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kondisi Tahun N-1	Target		
					Realisasi 2023	2024	2025	2026			Realisasi 2023	2024	2025	2026			Realisasi 2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Meningkatkan Tata Pemerintahan yang berkualitas dengan semangat reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan	Nilai SAKIP OPD		75.3	75.6	75.8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya		100	100	100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		2	2	2
															Administ rasi Keuangan	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN		12	12	12
															Administ rasi Kepegaw aian Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Kepegaw aian Perangkat Daerah		40	45	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															Administ rasi Umum Perangka t Daerah	Jumlah penyedia an administr asi umum perangka t daerah		12	12	12
															Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjan g urusan pemerint ah daerah yang tersedia		9	9	9
															Penyedia an Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah	Jumlah penyedia an jasa penunjan g urusan pemerint ahan daerah		12	12	12
															Pemeliha raan Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah	Jumlah pemeliha raan barang milik daerah		12	12	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
									Prpgram Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat		100	100	100	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan		2	2	2
			Meningkatkan kondusifitas wilayah	Jumlah Kasus gangguan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan		0	0	0	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah Dalam Keradaan Kondusif		100	100	100	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		12	12	12
									Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Keagamaan		100	100	100	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		12	12	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Angka Kemiskinan	Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun		0,8	0,9	0,9	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif		100	100	100	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		11	11	11
									Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Wilayah Tertib Perda		100	100	100	Fasilitasi, Rekomendasi & Koordinasi Pembinaan & Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa		40	40	40

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Kecamatan Jumantono

5.1.1 Strategi Kecamatan Jumantono

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Adapun strategi dari pencapaian program Kecamatan Jumantono adalah :

1. Mengoptimalkan program penanggulangan kemiskinan dan penurunan kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan, peningkatan akses permodalan, pengembangan kewirausahaan dan kemitraan di masyarakat.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada untuk dapat memberikan kinerja pelayanan maupun operasional kecamatan yang baik.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah kecamatan yang sempat terjadi penurunan akibat adanya wabah pandemi covid-19 yang mengakibatkan terpuruknya semua kegiatan di sektor perekonomian.
4. Mitigasi bencana agar resiko dapat dicegah sejak dini, dan meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat mengenai ancaman bencana.

5.1.2. Kebijakan

Sesuai dengan strategi di atas dan dengan tetap mengacu kepada tujuan Kecamatan Jumantono, maka dirumuskan pokok-pokok kebijakan Kecamatan yang menjadi acuan dalam menetapkan program pembangunan 3 (tiga) tahun ke depan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Meningkatkan program kewirausahaan dan kemitraan di wilayah Kecamatan Jumantono.
2. Meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Jumantono.
3. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Jumantono.
4. Meningkatkan mitigasi bencana alam.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran, Kecamatan Jumantono tercantum pada Tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Jumantono
Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<p>1. Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi</p> <p>2. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan</p> <p>2. Meningkatkan kondusifitas wilayah</p> <p>3. Meningkatkan kualitas pembangunan desa</p>	<p>1. Mengoptimalkan program penanggulangan kemiskinan dan penurunan kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan, peningkatan akses permodalan, pengembangan kewirausahaan dan kemitraan di masyarakat.</p> <p>2. Meningkatkan sarana dan prasaranakantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran</p> <p>2. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Jumantono</p> <p>2. Meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Jumantono</p> <p>3. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Jumantono</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik. Guna menghadapi tantangan dimaksud perlu dilakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jumantono pada periode 2024-2026. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya review Renstra oleh Pimpinan puncak beserta *stakeholder* secara berkala berbentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review menunjukkan tingginya komitmen Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar.

Program yang telah disusun dan ditetapkan pada Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar untuk pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - f. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - a. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
- III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
 - b. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional.
- VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - c. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - d. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - e. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Jumantono Tahun 2024-2026 seperti yang disajikan pada Tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Jumantono
Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026

Tujuan	SASARAN OPD	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEG IATAN/SUB KEGIATAN	KONDI SI TAHUN 2023	2024		2025		2026		TARGET AKHIR RPD		LOKA SI	OPD PELAKSANA
						Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		
1	3	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi															
			UNSUR KEWILAYAHAN			100	3.157.386.000	100	3.631.001.000	100	4.170.116.000	100	10.958.503.000		
Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan					Na	75,3	2.826.663.000	75,6	3.250.668.000	75,8	3.738.276.000	75,9	9.815.607.000		

		7	0	0			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Jumlah indikator sasaran dan program di Kecamatan yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di Kecamatan dikali 100%	Na	100 %	2.820.339.000	100 %	3.243.395.000	100 %	3.729.912.000	100 %	9.793.646.000		Kecamatan Jumantono
		7	0	0	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Na	2 Dok	4.025.000	2 Dok	4.629.000	2 Dok	5.324.000	6 Dok	13.978.000		Kecamatan Jumantono

		7	0	0	2	0	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Na	2 Lap	7.645.000	2 Lap	8.792.000	2 Lap	10.111.000	6 Lap	26.548.000		Kecamatan Jumantono
		7	0	0	2	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Na	100 %	1.878.800.000	100 %	2.160.620.000	100 %	2.484.713.000	100 %	6.524.133.000		Kecamatan Jumantono

		7	0	0	2	0	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang menerima gaji	Na	100 %	1.878.800.000	100 %	2.160.620.000	100 %	2.484.713.000	100 %	6.524.133.000		Kecamatan Jumantono
		7	0	0	2	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Na	100 %	207.805.000	100 %	238.977.000	100 %	274.826.000	100 %	721.608.000		Kecamatan Jumantono

		7	0	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor	Na	12 Pak et	9.200.000	12 Pak et	10.580.000	12 Pak et	12.167.000	36 Pak et	31.947.000		Kecamatan Jumantono
		7	0	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat kebersihan kantor yang tersedia	Na	12 Pak et	10.000.000	12 Pak et	11.500.000	12 Pak et	13.225.000	36 Pak et	34.725.000		Kecamatan Jumantono

		7	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang tersedia	Na	12 Paket	6.900.000	12 Paket	7.935.000	12 Paket	9.126.000	36 Paket	23.961.000		Kecamatan Jumantono
		7	0	0	2	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Na	12 Paket	9.591.000	12 Paket	11.030.000	12 Paket	12.685.000	36 Paket	33.306.000		Kecamatan Jumantono

		7	0	0	2	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Na	2 exe m plar , 1 Hari , 12 Bul an	3.174.000	3 exe m plar , 1 Hari , 12 Bul an	3.651.000	4 exe m plar , 1 Hari , 12 Bul an	4.199.000	4 exe m plar , 1 Hari , 12 Bul an	11.024.000		Kecamatan Jumantono
		7	0	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Na	12 Lap	163.940.000	12 Lap	188.531.000	12 Lap	216.811.000	12 Lap	569.282.000		Kecamatan Jumantono

		7	0	0	2	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Kecamatan Karangpandan)	Jumlah dokumen yang diarsipkan	Na	6 Dok	5.000.000	6 Dok	5.750.000	6 Dok	6.613.000	18 Dok	17.363.000		Kecamatan Jumantono
		7	0	0	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Na	100 %	355.562.000	100 %	408.897.000	100 %	470.233.000	100 %	1.234.692.000		Kecamatan Jumantono

		7	0	0	2	0	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia	Na	2 Unit	20.000.000	2 Unit	23.000.000	2 Unit	26.450.000	6 Unit	69.450.000		Kecamatan Jumantono
		7	0	0	2	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	Na	2 Unit	60.562.000	2 Unit	69.647.000	2 Unit	80.095.000	6 Unit	210.304.000		Kecamatan Jumantono

		7	0	0	2	0	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang Tersedia	Na	3 Unit	75.000.000	3 Unit	86.250.000	3 Unit	99.188.000	9 Unit	260.438.000		Kecamatan Jumantono
		7	0	0	2	1	Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Na	2 Unit	200.000.000	2 Unit	230.000.000	2 Unit	264.500.000	6 Unit	694.500.000		Kecamatan Jumantono

		7	0	0	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Na	100 %	311.166.000	100 %	357.842.000	100 %	411.520.000	100 %	1.080.528.000		Kecamatan Jumantono
		7	0	0	2	0	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang terlaksana	Na	12 Lap	1.104.000	12 Lap	1.270.000	12 Lap	1.461.000	12 Lap	3.835.000		Kecamatan Jumantono

		7	0	0	2	0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayarkan	Na	12 Lap	35.880.000	12 Lap	41.262.000	12 Lap	47.452.000	12 Lap	124.594.000		Kecamatan Jumantono
		7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum kantor yang dibayarkan	Na	12 Lap	274.182.000	12 Lap	315.310.000	12 Lap	362.607.000	12 Lap	952.099.000		Kecamatan Jumantono

		7	0	0	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	Na	100 %	55.336.000	100 %	63.638.000	100 %	73.185.000	100 %	192.159.000		Kecamatan Jumantono
		7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas dan dinas jabatan yang dilaksanakan	Na	2 Unit	28.733.000	2 Unit	33.043.000	2 Unit	38.000.000	6 Unit	99.776.000		Kecamatan Jumantono

		7	0	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	Na	8 Unit	20.861.000	9 Unit	23.991.000	10 Unit	27.590.000	10 Unit	72.442.000		Kecamatan Jumantono
		7	0	0	2	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Na	2 Unit	5.742.000	2 Unit	6.604.000	2 Unit	7.595.000	6 Unit	19.941.000		Kecamatan Jumantono

		7	0	0		PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	84.3	100	6.324.000	100 %	7.273.000	100 %	8.364.000	100 %	21.961.000		
		7	0	0	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah fasilitasi koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Na	100 %	6.324.000	100 %	7.273.000	100 %	8.364.000	100 %	21.961.000		Kecamatan Jumantono

		7	0	0	2	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Na	100 %	6.324.000	100 %	7.273.000	100 %	8.364.000		21.961.000		Kecamatan Jumantono
	Meningkatkan kondusifitas wilayah								Na	0	237.603.000	0	273.244.000	0	314.232.000	0	825.079.000		

		7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah wilayah dalam keadaan kondusif dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100%	Na	100 %	160.559.000	100 %	184.643.000	100 %	212.340.000	100 %	557.542.000		Kecamatan Jumantono
		7	0	0	2		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah fasilitasi koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Na	100 %	160.559.000	100 %	184.643.000	100 %	212.340.000	100 %	557.542.000		Kecamatan Jumantono

		7	0	0	2	0	Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Na	100 %	160.559.000	100 %	184.643.000	100 %	212.340.000	100 %	557.542.000	Kecamatan Jumantono
		7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah wilayah dalam tertib Perda dibagi jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100%	Na	100 %	77.044.000	100 %	88.601.000	100 %	101.892.000	100 %	267.537.000	Kecamatan Jumantono

		7	0	0	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Na	100 %	77.044.000	100 %	88.601.000	100 %	101.892.000	100 %	267.537.000		Kecamatan Jumantono
		7	0	0	2	0	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Na	100 %	55.200.000	100 %	63.480.000	100 %	73.002.000	100 %	191.682.000		Kecamatan Jumantono

		7	0	0	2	0	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Ketahanan Nasional	Na	100 %	21.844.000	100 %	25.121.000	100 %	28.890.000	100 %	75.855.000		Kecamatan Jumantono
Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial									Na										

		7	0	0	2		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Na	100 %	30.000.000	100 %	34.500.000	100 %	37.088.000	100 %	101.588.000		Kecamatan Jumantono
		7	0	0	2	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Na	11 Lembaga	10.000.000	11 Lembaga	11.500.000	11 Lembaga	13.225.000	11 Lembaga	34.725.000		Kecamatan Jumantono

		7	0	0	2	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Na	11 Lem ba ga	5.000.000	11 Lem ba ga	5.750.000	11 Lem ba ga	6.613.000	11 Lem ba ga	17.363.000		Kecamatan Jumantono
		7	0	0	2	0	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan PKK tingkat Kecamatan	Na	11 Lem ba ga	15.000.000	11 Lem ba ga	17.250.000	11 Lem ba ga	17.250.000	11 Lem ba ga	49.500.000		

		7	0	0		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah desa yang memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh desa diwilayah Kecamatan dikali 100%	Na	100 %	63.120.000	100 %	72.589.000	100 %	80.520.000	100 %	216.229.000		
		7	0	0	2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi dan pengawasan pemerintahan desa	Na	100 %	63.120.000	100 %	72.589.000	100 %	80.520.000	100 %	216.229.000		Kecamatan Jumantono

		7	0	0	2	0	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Na	100 %	20.120.000	100 %	23.138.000	100 %	26.609.000	100 %	69.867.000		Kecamatan Jumantono
		7	0	0	2	0	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Na	100 %	22.357.000	100 %	25.711.000	100 %	26.609.000	100 %	74.677.000		Kecamatan Jumantono

		7	0	0	2	0	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Na	100 %	6.843.000	100 %	7.870.000	100 %	9.051.000	100 %	23.764.000		Kecamatan Jumantono
		7	0	0	2	1	Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan jumlah seluruh wilayah Kecamatan dikali 100%	Na	100 %	13.800.000	100 %	15.870.000	100 %	18.251.000	100 %	47.921.000		Kecamatan Jumantono

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kecamatan Jumantono menjadi salah satu perangkat daerah yang berperan dalam mewujudkan tujuan Terwujudnya infrastruktur menyeluruh dan tata kelola pemerintahan yang baik, untuk kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing, inklusif, tangguh dan berkelanjutan dengan sasaran Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Jumantono yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Capaian Tahun		Target Capaian Tahun			Target Akhir RPJMD
			2019	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai SAKIP	NA	Na	84.3	84.3	100	100	100	100
2	IKM	NA	Na	100	100	100	100	100	100
3	% lembaga kemasyarakatan aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
4	% wilayah dalam keadaan kondusif	%	100	100	100	100	100	100	100
5	% wilayah tertib perda	%	Na	100	100	100	100	100	100
6	% sarpras wilayah dalam kondisi baik	%	Na	100	100	100	100	100	100
7	% Desa memiliki APDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	Na	100	100	100	100	100	100
8	% kehadiran musrenbang	%	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na

BAB VIII PENUTUP

8.1 Program Transisi

Periode Rencana Strategis Kecamatan Jumantono berakhir sampai dengan tahun 2023, sedangkan penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 dilaksanakan pada awal tahun 2023. Oleh karena itu sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja tahun 2024, perlu disusun Program Transisi pada tahun dimaksud. Dalam penyusunan program transisi mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 - 2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Jumantono agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh ASN di Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Jumantono dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Kecamatan Jumantono akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jumantono yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Kecamatan wajib berpedoman pada Renstra Kecamatan Jumantono.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Kecamatan Jumantono, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Jumantono sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Rencana Strategis Kecamatan Jumantono Tahun 2024 – 2026, telah selesai disusun, oleh karena itu

sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Jumantono.

BUPATI KARANGANYAR

JULIYATMONO

Telah Dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah	
2.Kepala BAPERLITBANG	
3.Camat Jumantono	

